



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET SUTANTYO**
2. Jabatan : **KEPALA KANWIL**
3. NHK : **123253**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.867.097.000

1. Tanah Seluas 2566 m2 di KAB / KOTA CILACAP, WARISAN Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 249.298.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.417.799.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 452.485.372

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. LAINNYA, ---(2 BUAH SEPEDA) SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
4. MOBIL, KIJANG MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
5. LAINNYA, BROMPTON M6R Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 26.485.372

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 311.600.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.252.236.147



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.883.418.519

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.883.418.519

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.